

**REFOCUSING APBD KABUPATEN YAHUKIMO DALAM MENDUKUNG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Mariana Heselo

NPP. 30.1491

Asdaf Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Program Studi Keuangan Publik

Email: marianaheselo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs.Eko Subowo, MBA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of this research is the lack of coordination and communication between agencies or organizations in the Yahukimo Regency area and the lack of understanding of the competence of human resources regarding their duties and functions, which causes delays in preparing financial reports. This had an effect on the refocusing of the Yahukimo District APBD in supporting the establishment of the New Autonomous Region (Papua Mountains Province) which was carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency and the Yahukimo District Regional Planning and Development Agency. **Purpose:** The purpose of this study is to get an overview of the refocusing implementation process, what obstacles are encountered in the refocusing implementation and what efforts are being made so that the refocusing implementation process can run well. **Method:** This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The theory used is Forrester & Mulins (1922) which is divided into three types of categories in the implementation of refocusing, namely managerial needs, environmental pressures and political concerns. As for data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. **Results:** The results of the study show that the implementation of APBD refocusing has been running effectively and this is fully supported by the regional government of Yahukimo Regency, Papua Mountains Province, so that the Yahukimo Regency government only needs to see how the process of managing the APBD that has been granted is. **Conclusion:** Obstacles encountered in the implementation of APBD refocusing are coordination and communication between agencies and Regional Apparatus Organizations (OPD) that are not going well where organizations related to the implementation of refocusing

are late in submitting financial reports which become an obstacle in the process of managing funds or budgets to be allocated to support. In this study the researchers also provided suggestions, namely: it is necessary to have training activities for ASN/PNS of the Yahukimo Regency government so that they can increase competence in the field of financial management such as through employee training and also to increase the discipline of each employee so as not to hinder the process of activities or work.

Keywords: Implementation; Regional Finance; Internal Control System

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakan (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi atau organisasi yang ada di daerah Kabupaten Yahukimo dan kompetensi sumber daya manusia kurang memahami mengenai tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini berpengaruh pada Refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran proses pelaksanaan refocusing, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan refocusing dan upaya-upaya apa saja dilakukan agar proses pelaksanaan refocusing bisa terlaksana dengan baik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teori yang digunakan yaitu Forrester & Mulins (1922) yang terbagi atas tiga jenis kategori dalam pelaksanaan refocusing yaitu *managerial necessity*, *environmental prassure* dan *political concers*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan refocusing APBD sudah berjalan dengan efektif dan hal ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan sehingga pemerintah Kabupaten Yahukimo tinggal melihat bagaimana proses pengelolaan APBD yang sudah dihibahkan. **Kesimpulan:** Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan refocusing APBD adalah kordinasi dan komunikasi antar pihak instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang berjalan dengan baik dimana organisasi yang terkait dengan pelaksanaan refocusing terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan dana atau anggaran yang akan di alokasikan untuk mendukung. Dalam penelitian ini peneliti ikut memberikan saran yaitu: perlu adanya kegiatan pelatihan bagi ASN/PNS pemerintah Kabupaten Yahukimo agar dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan seperti

melalui diklat pegawai dan juga agar meningkatkan kedisiplinan masing-masing pegawai agar tidak menghambat dalam proses kegiatan ataupun pekerjaan.

Kata Kunci: Refocusing, APBD, dan Daerah Otonomi Baru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah merujuk pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 yang dilandaskan pada tiga tujuan yang utama yakni, tujuan administrasi, tujuan politik dan tujuan ekonomi. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan dialirkannya dana perimbangan kedalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD tahun anggaran 2021 sangat berbeda ada yang mengalami kenaikan anggaran dan juga menurun drastis, Adapun presentasi yang naik drastis menurun. Dilihat juga pada Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimana di tahun 2021 dan 2022 Anggaran, Realisasi dan Presentasi tidak ada sama sekali dan kabupaten lainnya juga demikian. Hal ini merupakan gambaran umum permasalahan yang ada di Kabupaten yang berada Provinsi Papua Pegunungan. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan Kabupaten Yahukimo. yang merupakan salah satu Kabupaten yang dulunya termasuk Provinsi Papua dimana saat ini sudah ditetapkan dengan UU No.16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan tidak terhindar dari Refocusing anggaran. Dimana sebelum berlakunya aturan Refocusing anggaran, Keseluruhan Belanja anggaran Kabupaten Yahukimo tercatat sebesar 1.647,400,000 dan terjadi penurunan

anggaran sebesar 1,522,700,000 ini berarti bahwa anggaran dari beberapa kegiatan atau program dialihkan untuk mendukung Pembentukan DOB Papua Pegunungan, Akan tetapi dalam pelaksanaan Refocusing anggaran untuk mendukung Pembentukan DOB ini sering terjadi beberapa permasalahan-permasalahan diantaranya yaitu, Proses Refocusing APBD dalam mendukung pembentukan DOB, Upaya-Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung dan merealisasikan anggaran dalam mendukung Pembentukan DOB dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga harus mempersiapkan lebih matang dalam mendukung Pembentukan DOB karena akan ada banyak hambatan-hambatan yang akan terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Di tahun 2021 anggaran APBD pada pendapatan sebesar Rp.1.522,70 miliar, Belanja sebesar Rp.1.528,56 miliar dan Pembiayaan Rp.00,00 miliar dan ditahun 2022 terjadi kenaikan dimana Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.647,40 miliar, Belanja sebesar Rp.1.668,03 miliar dan Pembiayaan sebesar Rp.12,85 miliar. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran APBD pada Pembiayaan tidak ada sama sekali dan realisasi anggaran ditahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.
- 2) Dalam pelaksanaan Refocusing anggaran untuk mendukung Pembentukan DOB ini sering terjadi beberapa permasalahan-permasalahan diantaranya yaitu, Proses Refocusing APBD dalam mendukung pembentukan DOB, Upaya-Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung dan merealisasikan anggaran dalam mendukung Pembentukan DOB dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga harus mempersiapkan lebih matang dalam mendukung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru. Penelitian Ariq Ghufan berjudul Pelaksanaan Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan covid-19 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, menemukan bahwa untuk membantu penanganan pandemi covid-19 pemerintah menginstruksikan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap anggaran untuk melakukan penanganan dan juga pencegahan dari penyebaran covid-19 dilakukan dengan penjadwalan ulang terhadap capaian

program dan kegiatan lainnya (Ariq Ghufuran, 2022). Penelitian Aisyah Thasa & Reni Dwi mengkaji Refocusing pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun dalam penanganan covid-19 tahun 2020 dengan melakukan pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran refocusing yang dimana dituangkan dalam bentuk laporan-laporan kegiatan (Aisyah Thasa Khairunnisa & Reni Dwi Purnomowati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Giovani Rizki dan Sri Dwi ditemukan bahwa kegiatan prioritas mampu meningkatkan presentase realisasi anggaran yang dapat dilihat pada LKJIP yang dimulai pada tahun 2020-2021, artinya dinas koperasi dan usaha mikro Kota Blitar mampu dan bertanggungjawab terhadap alokasi anggaran dan sebagai organisasi perangkat daerah (Giovani Rizki Dhia Aldila dan Sri Dwi Estiningrum, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan mengenai Refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan) dengan berbagai faktor penghambat terhadap proses pelaksanaan refocusing APBD tersebut. Metode yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi juga berbeda dengan penelitian Aisyah dan Giovani. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni teori Refocusing anggaran (Forrester&Mullins) 1992 dengan 3 (tiga) dimensi yaitu Kebutuhan SDM, Fenomena Lingkungan dan Penyesuaian Regulasi Anggaran.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran proses pelaksanaan refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan), hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan refocusing dan upaya-upaya apa saja dilakukan agar proses pelaksanaan refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan) bisa terlaksana dengan baik.

II. METODE

Peneliti menggunakan Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan fenomenologi. Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan refocusing APBD dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua

Pegunungan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan data yang tersedia di perpustakaan, buku ataupun arsip yang tersedia di daerah. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah sumber data primer yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, dan data data primer yang digunakan yaitu data yang tersedia diperpustakaan, buku ataupun arsip yang tersedia di daerah. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 (delapan) orang informan. Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data terhadap angka- angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara bersama informan yang akan disajikan sebagai data primer. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan mengenai Refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan dimensi dari Teori Forrester&Mullins (1992) tentang Refocusing Anggaran. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

a. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa refocusing APBD dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Pegunungan sangatlah membawa dampak positif sehingga dapat memenuhi indikator SDM ini. Dengan adanya refocusing anggaran dapat terjadi penurunan anggaran yang sangat signifikan lebih khususnya di daerah-daerah ini. Hal ini sangatlah buruk bagi masyarakat atau pemerintah daerah. Kabupaten Yahukimo. Namun demikian, sesuai dengan prinsip *managerial necessity*, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebutuhan dana atau anggaran yang sangat banyak untuk mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan ini. Partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan refocusing APBD Kabupaten Yahukimo bukan hanya pimpinan saja tetapi juga melibatkan pihak lain seperti pihak bawahan dan pihak luar. Tentunya setiap pihak dalam pemaparan tersebut memiliki pengaruh dalam keberhasilannya pelaksanaan refocusing APBD. Koordinasi partisipasi antar pihak dalam membahas SDM juga menjadi peran dalam melaksanakan refocusing APBD.

b. Fenomena Lingkungan Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam hal Pengalihan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo sudah sesuai aturan yang berlaku sehingga seluruh kekuasaan atau kewenangan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dialihkan untuk mendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan. Dalam hal ini Instansi yang memegang kendali atas refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini sendiri adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo. Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan penyusunan anggaran untuk setiap tahun dan sudah mulai dipersiapkan pada bulan juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaan APBD tersebut perlu perubahan dan penyelesaian.

c. Penyesuaian Regulasi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo, dalam melaksanakan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut di instruksikan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Yahukimo, pada tahun 2022 jumlah biaya belanja APBD Kabupaten Yahukimo mencapai Rp. 1.215.596.444.606 sedangkan jumlah belanja APBD Kabupaten Yahukimo setelah perubahan mencapai Rp.1.197.316.467.041 oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengambil kebijakan untuk meminimalkan jumlah belanjanya dan segera melaksanakan refocusing APBD. Kemudian diakibatkan dari pembentukan DOB Provinsi Papua Pegunungan turut berimbas terhadap kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Di tahun 2021 anggaran APBD pada pendapatan sebesar Rp.1.522,70 miliar, Belanja sebesar Rp.1.528,56 miliar dan Pembiayaan Rp.00,00 miliar dan ditahun 2022 terjadi kenaikan dimana Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.647,40 miliar, Belanja sebesar Rp.1.668,03 miliar dan Pembiayaan sebesar Rp.12,85 miliar. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran APBD pada Pembiayaan tidak ada sama sekali dan realisasi anggaran ditahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaan Refocusing anggaran untuk mendukung Pembentukan DOB ini sering terjadi beberapa permasalahan-permasalahan diantaranya yaitu, Proses Refocusing

APBD dalam mendukung pembentukan DOB, Upaya-Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung dan merealisasikan anggaran dalam mendukung Pembentukan DOB dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga harus mempersiapkan lebih matang dalam mendukung.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan refocusing dan upaya-upaya apa saja dilakukan agar proses pelaksanaan refocusing APBD Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan) bisa terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dimensi yang penulis pakai dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan refocusing APBD di Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan refocusing APBD adalah kordinasi dan komunikasi antar pihak instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang berjalan dengan baik dimana organisasi yang terkait dengan pelaksanaan refocusing terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan dana atau anggaran yang akan di alokasikan untuk mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan refocusing APBD memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dan memberikan para pegawai pelatihan supaya proses pelaksanaan refocusing APBD yang berjalan dengan lancar dan lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan refocusing APBD dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Pegunungan sebagai pendekatan fenomenologi yang dipilih berdasarkan pendapat Alfred Schurtz (2009:230).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan refocusing APBD dalam mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Pegunungan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Tuhan Yesus dan keluarga khususnya orang tua saya yang selalu ada dan mendukung dalam setiap hal. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo, dan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik :Teori, Konsep Dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat Widjaja.
- Aos. 2016. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (Unisma).
- Schutz, Alfred (john wild dkk). 1967. The Phenomenology of the Social World.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Aisyah thasa Khairunnisa & Reni dwi purnomowati, (2020). Refocusing Pengeloaan APBD Kabupaten Sarolangun dalam penanganan Covid-19 tahun 2020, 6(2) 13-15
- Giovani rizki dhia aldila dan sri dwi estiningrum (2022) Kebijakan Refocusing anggaran dan strategi di masa pandemic Covid-19 (2022), 3(1) 40-61(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)